

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN




KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan Tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan Tahunan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPU Kabupaten Klaten. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Klaten, 26 Januari 2026
KPU KABUPATEN KLATEN
SEKRETARIS

IKA NURMALIANA DEWI, SE, MAP
NIP. 197906282009122002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan Laporan Keuangan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	32
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	36
F. Pengungkapan Penting Lainnya	39
Lampiran	40



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jalan Dewi Sartika Nomor : 39 Klaten Kode pos 57411
Telepon (0272) 321494,322670 Fax (0272) 327200

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahunan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Tahunan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Klaten, 26 Januari 2026

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
SEKRETARIS**


IRA NURMALIANA DEWI, SE, MAP
NIP 197906282009122002

Laporan Keuangan Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2025 adalah berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp552.340.678,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 0,-

Realisasi Belanja Negara pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Klaten sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.205.452.569,- atau mencapai 98,93 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp6.272.262.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana sampai dengan 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.112.368.035,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp0,- Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp731.453.493,- Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp380.914.542,- dan Aset Lainnya (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp1.112.368.035,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit pos luar biasa, dan surplus/defisit LO. Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,-. sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp6.788.356.588,- sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp6.788.356.588,-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Sebelum Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 0,- dan sebesar Rp528.140.678,- sehingga entitas mengalami defisit LO sebesar Rp6.260.215.910,-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 12.541.161.918,- dikurangi defisit-LO sebesar Rp6.260.215.910,- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan ditambah dengan transaksi antar entitas sebesar Rp 3,468,551;007,- sehingga ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.112.368.035,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahunan Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	21.100.000	0,00	86.720.522
JUMLAH PENDAPATAN		-	21.100.000	0,00	86.720.522
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	3.150.925.000	3.148.520.464	99,92	2.659.832.463
Belanja Barang	B.4	3.093.979.000	3.029.715.055	97,92	124.714.310.529
Belanja Modal	B.5	27.358.000	27.217.050	99,48	222.800.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
Pinjaman dan Hibah	B.7	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		6.272.262.000	6.205.452.569	98,93	127.596.942.992

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	10.904.339.864
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
BAGIAN LANCAR TP/TGR (NETTO)	C.8	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.9	-	311.114.581
Persediaan	C.10	-	-
Persediaan Belum Diregister	C.11	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	11.215.454.445
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.12	383.211.097	407.411.097
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan TP TGR	C.13	(2.296.555)	(2.296.555)
TAGIHAN TP/TGR (NETTO)	C.14	380.914.542	405.114.542
Jumlah Piutang Jangka Panjang		380.914.542	405.114.542
ASET TETAP			
Tanah	C.15	-	-
Peralatan dan Mesin	C.16	3.203.066.351	3.175.849.301
Gedung dan Bangunan	C.17	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.18	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.19	27.455.000	27.455.000
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.20	-	-
Akumulasi Penyusutan	C.21	(2.499.067.858)	(2.200.061.370)
Jumlah Aset Tetap		731.453.493	1.003.242.931
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.22	-	-
Aset Lain-Lain	C.23	805.908.441	805.908.441
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.24	(805.908.441)	(805.908.441)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		1.112.368.035	12.623.811.918
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.25	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.26	-	82.650.000
Pendapatan Diterima di Muka	C.27	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.28	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	82.650.000
JUMLAH KEWAJIBAN		-	82.650.000
EKUITAS			
Ekuitas	C.29	1.112.368.035	12.541.161.918
JUMLAH EKUITAS		1.112.368.035	12.541.161.918
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.112.368.035	12.623.811.918

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024

(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	-	3.721.116
JUMLAH PENDAPATAN		-	3.721.116
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	3.148.520.464	2.659.832.463
Beban Persediaan	D.3	-	7.725.348.392
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.361.225.046	119.046.459.073
Beban Pemeliharaan	D.5	287.336.790	171.616.893
Beban Perjalanan Dinas	D.6	692.267.800	3.900.492.374
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	299.006.488	296.510.024
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		6.788.356.588	133.800.259.219
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(6.788.356.588)	(133.796.538.103)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset	D.11	528.135.700	-
Beban Pelepasan Aset	D.12	-	-
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		528.135.700	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	4.978	425.371.576
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	-	404.000
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		528.140.678	424.967.576
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(6.260.215.910)	(133.371.570.527)
POS LUAR BIASA	D.15		
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(6.260.215.910)	(133.371.570.527)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024***(dalam Rp)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	E.1	12.541.161.918	26.139.913.412
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(6.260.215.910)	(133.371.570.527)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(8.637.128.980)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	E.3.1	-	-
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.2	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.7	(8.637.128.980)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	3.468.551.007	119.772.819.033
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(11.428.793.883)	(13.598.751.494)
EKUITAS AKHIR	E.6	1.112.368.035	12.541.161.918

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar
Hukum*

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

*Rencana
Strategis*

RENCANA STRATEGIS KPU

Terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk didalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga

legislatif, penyelenggara pemilihan umum, dan lembaga penyelenggara negara lainnya serta terlaksananya pemilihan umum yang adil dan demokratis.

1. Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Misi

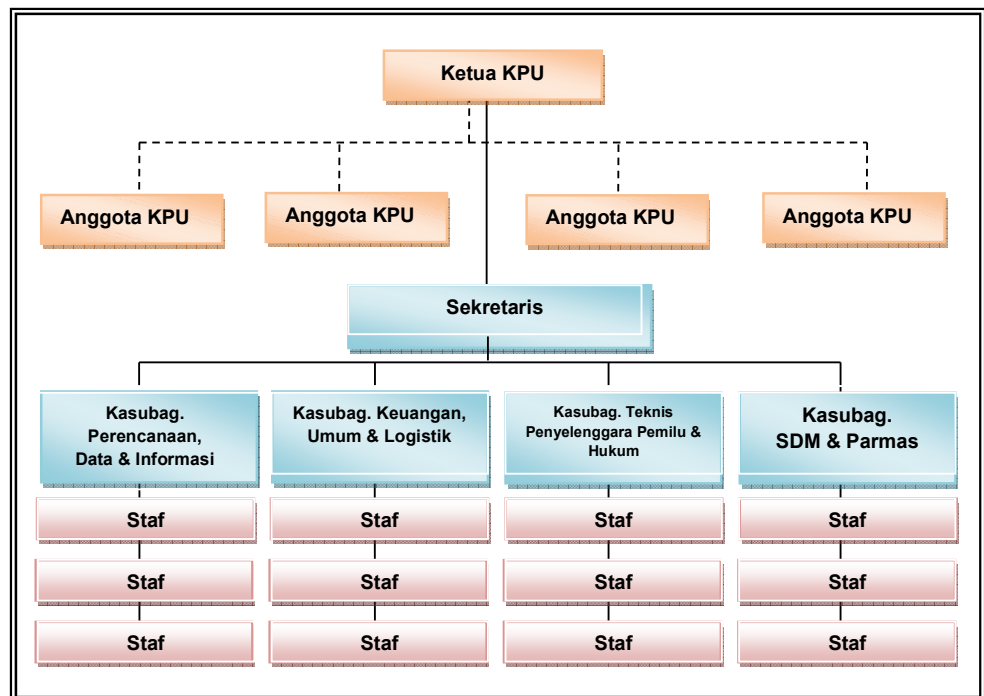
- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

STRUKTUR ORGANISASI KPU KABUPATEN KLATEN

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sumber Daya manusia (SDM) dan Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yakni sebagai berikut :

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	STATUS
1	Strata 2	2	2	4	ASN
2	Strata 1	12	6	18	ASN
3	Diploma III	1	1	2	ASN
4	SLTA	6	0	6	ASN
5	SLTP	0	0	0	ASN
6	PPNPN	1	0	1	PPNPN

BAGAN ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN



A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui aplikasi berbasis web yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) terutama pada Modul GL dan Pelaporan. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Salah satu Modul yang menjadi bagian di dalam SAKTI adalah Modul GL dan Pelaporan yang memuat keseluruhan proses yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan. Modul GL dan Pelaporan dirancang untuk menggantikan fungsi SAIBA dalam menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

A.4 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPU Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan* **(1) Kebijakan Akuntansi Atas Pendapatan**
- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
 - Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
 - Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- Kebijakan Akuntansi atas Belanja* **(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja**
- Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
 - Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
 - Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

*Kebijakan
Akuntansi
atas Aset*

(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

*Aset
Lancar*

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam

waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset
Tetap*

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian..

*Piutang
Jangka
Panjang*

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak

langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Aset
Lainnya*

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain merupakan aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

*Kebijakan
Akuntansi
atas
Kewajiban*

(4) Kewajiban Akuntansi atas Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Kebijakan Akuntansi Atas Ekuitas Dana **(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana**

- Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan *kewajiban* pemerintah.
- Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.
- Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan *kewajiban* jangka pendek.
- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih **(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan Aset Tetap

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penyusunan Laporan Keuangan TA 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sudah menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK/.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan asset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) dan Asset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk

dilakukan penghapusan.

- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2025 untuk asset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2025. Sedangkan untuk asset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2025, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor :59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum table masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

Pendapatan Negara dan Hibah

Rp552.340.678,-

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp552.340.678,- Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	TAHUN 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1. Penerimaan Perpajakan	-	-	-
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	552.340.678	-
		-	-
Jumlah	-	552.340.678	-

Realisasi Belanja

Negara

Rp6.205.452.569,-

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.205.452.569,- atau 98,93 persen dari anggaran senilai Rp6.272.262.000,- Rincian Anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 tersaji pada Tabel berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	3.150.925.000	3.148.520.464	99,92
Belanja Barang	3.093.979.000	3.029.715.055	97,92
Belanja Modal	27.358.000	27.217.050	99,48
Belanja Hibah	0	0	0
Total Belanja	6.272.262.000	6.205.452.569	98,93

Belanja Pegawai

Rp3.148.520.464,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sampai dengan 31 Desember 2025 meliputi : Belanja Gaji

dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK; Belanja Tunjangan Umum PNS dan Tunjangan Fungsional PPPK dan Belanja Pegawai Transito.

Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	TA. 2025			TA. 2024			Naik (Turun) %
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	
Belanja Pegawai	3.150.925.000	3.148.520.464	99,92%	2.671.982.000	2.659.832.463	99,55%	0,38%

Berdasarkan Tabel di atas, Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.148.520.464,- dan Rp2.659.832.463,-. Walaupun anggaran belanja pegawai tahun 2025 mengalami kenaikan 17,92 persen dari tahun sebelumnya namun prosentase realisasi belanja pegawai sampai dengan 31 Desember 2025 juga mengalami kenaikan sebesar 0,38 persen dari prosentase realisasi belanja TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya Penambahan 10 (sepuluh) orang ASN berstatus PPPK
2. Adanya Penambahan 3 (tiga) orang PNS berstatus Pegawai Pindahan.

Belanja Barang
Rp3.029.715.055,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.029.715.055,- dan Rp124.714.310.529,-.

Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	TA. 2025			TA. 2024			Naik (Turun) %
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	
Belanja Barang	3.093.979.000	3.029.715.055	97,92%	135.875.909.000	124.714.310.529	91,79%	6,14%

Berdasarkan Tabel tersebut, terlihat bahwa Prosentase Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember TA 2025

mengalami peningkatan sebesar 6,14 persen dari Prosentase Realisasi Belanja Barang TA 2024.

*Belanja Modal
Rp27.217.050,-*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp27.217.050,- dan Rp222.800.000,-. Pada Tahun Anggaran 2025, KPU Kabupaten Klaten memperoleh alokasi Pagu Anggaran Belanja Modal sebesar Rp27.358.000,-. Prosentase Realisasi Belanja Modal KPU Kabupaten Klaten Tahun 2025 adalah sebesar 99,48%.

*Belanja Bantuan
Sosial Rp.0,-*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp 0,-. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember TA 2025 sama dibandingkan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember TA 2024. Hal ini disebabkan pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024 tidak ada Pagu Anggaran Bantuan Sosial.

*Belanja Hibah
Rp.0,-*

B.7 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah sampai dengan 31 Desember TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp 0,-. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember TA 2025 sama dibandingkan Realisasi Belanja Hibah Per 31 Desember TA 2024. Hal ini disebabkan pada Tahun Anggaran 2025 dan 2024, semua anggaran hibah yang diterima KPU Kabupaten Klaten telah dikonversi ke APBN. Anggaran hibah tersebut meliputi Hibah Non Pemilihan di TA 2025 dan Hibah Pilkada di TA 2024.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp 0,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per Tanggal 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. Rp. 0,-. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0,-*

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp0,-.

*Piutang Bukan
Pajak Rp 0,-*

C.4 Piutang Bukan Pajak

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki Piutang Bukan Pajak.

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp 0,-*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.0,-

*Bagian Lancar TPA
Rp 0,-*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar
Rp 0,-*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten per 31 Desember 2025 tidak memiliki Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar.

Bagian Lancar
TP/TGR (Netto)
Rp.0,-

C.8 Bagian Lancar TP/TGR (Netto)

Nilai Bagian Lancar TP/TGR (Netto) untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,-

Belanja Dibayar
Dimuka
Rp0,-

C.9 Belanja Dibayar Dimuka

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,-.

Persediaan
Rp0,-

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Per 31 Desember TA 2025 dan 2024

Jenis	TA 2025	TA 2024
Barang Konsumsi	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Persediaan yang Belum Diregister	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Tagihan
TP/TGR
Rp383.211.097

C.12 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Per 31 Desember 2025 dan 2024 memiliki Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) masing-masing sebesar Rp383.211.097,- dan Rp407.411.097,-. Adapun Rincian dari Piutang Tagihan TP/TGR adalah

sebagai berikut :

Tgl. Setoran	NTPN	Nominal	Saldo Piutang TP/TGR
Saldo Awal 2025			407.411.097
01 Januari 2025	5612361QV4JTR824	2.200.000	405.211.097
01 February 2025	3A6C01JNG83B2GTS	2.200.000	403.011.097
01 Maret 2025	E03D31JNG844NDQJ	2.200.000	400.811.097
02 Mei 2025	80AAD55DFILRKPG1	2.200.000	398.611.097
03 Juni 2025	925893CIFTK1GS2C	2.200.000	396.411.097
04 Juli 2025	A1AD11JNG818B9I7	4.400.000	392.011.097
12 Agustus 2025	16E8E48VVOCHGVC1	2.200.000	389.811.097
08 September 2025	24D287QLV2P45DQD	1.100.000	388.711.097
02 Oktober 2025	24F4E2G503DJ0C52	1.100.000	387.611.097
02 November 2025	46F8F6U8F8CGMA8L	2.200.000	385.411.097
04 Desember 2025	78C738N3ETK860EL	2.200.000	383.211.097

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan TP/TGR Rp2.296.555,-

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan TP/TGR

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Per 31 Desember 2025 dan 2024 melakukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) masing-masing sebesar Rp2.296.555,-

Tagihan TP/TGR (Netto) Rp380.914.542,-

C.14 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Netto

Adapun Saldo Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Netto pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp380.914.542,- dan Rp405.114.542,-

Tanah Rp 0,-

C.15 Tanah

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki Aset Berupa Tanah.

Peralatan dan Mesin

C.16 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31

Rp3.203.066.351,- Desember 2025 yaitu Rp3.203.066.351,- dan saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.175.849.301,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	3.175.849.301
Mutasi tambah:	
Peralatan dan Mesin	27.217.050
Hibah Barang	-
Transfer Masuk	-
Koreksi tambah	-
Mutasi kurang:	-
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	3.203.066.351

Rincian penambahan peralatan dan mesin tersebut adalah :

1. Rak Display senilai Rp14.835.000,-
2. 1 (satu) unit PC dan Printer senilai Rp12.382.050,-

*Gedung dan
Bangunan
Rp. 0,-*

C.17 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 0,- dan Rp 0,-.

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp.0,-*

C.18 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Aset Tetap Lainnya
Rp27.455.000,-*

C.19 Aset Tetap Lainnya

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten memiliki Aset tetap Lainnya dengan Saldo per 31 Desember 2025 senilai Rp27.455.000,-

*Peralatan dan
Mesin Belum
Diregister Rp.0,-*

C.20 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Saldo Peralatan dan Mesin Belum Diregister Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.0,-.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp2.499.067.858,-*

C.21 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah Rp2.499.067.858,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.203.066.351	2.499.067.858	703.998.493
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		3.203.066.351	2.499.067.858	703.998.493

*Aset Tidak
Berwujud Rp 0,-*

C.22 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) KPU Kabupaten Klaten per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0,- dan Rp.0,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

*Aset Lain-Lain
Rp805.908.441,-*

C.23 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain KPU Kabupaten Klaten per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp805.908.441,- dan Rp805.908.441,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp805.908.441,-*

C.24 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya KPU Kabupaten Klaten per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp805.908.441,- dan Rp 0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Uang Muka dari
KPPN Rp.0,-*

C.25 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Uang Muka dari KPPN tersebut merupakan Uang Persediaan (UP) yang diberikan KPPN dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp82.650.000,-*

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp82.650.000,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp 0,-*

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki Pendapatan diterima di muka.

*Beban yang Masih
Harus Dibayar
Rp0,-*

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tidak memiliki beban yang masih harus dibayar.

*Ekuitas
Rp1.112.368.035,-*

C.29 Ekuitas

Ekuitas KPU Kabupaten Klaten per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.112.368.035,- dan Rp12.541.161.918,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP
Rp0,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,- dan Rp3.721.116,-.

Beban Pegawai
Rp3.148.520.464,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.148.520.464,- dan Rp2.659.832.463,- . Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Persediaan
Rp.0,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp7.725.348.392,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Barang dan
Jasa
Rp2.361.225.046,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa KPU Kabupaten Klaten Per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.361.225.046,- dan Rp119.046.459.073,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

*Beban
Pemeliharaan
Rp287.336.790,-*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp287.336.790,- dan Rp171.616.893,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp692.267.800,-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas KPU Kabupaten Klaten Per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp692.267.800,- dan Rp3.900.492.374,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0,-*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Beban Bantuan
Sosial Rp 0,-*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp299.006.488,-*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp299.006.488,- dan Rp296.510.024,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp 0,-

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,-.

*Pendapatan Pelepasan Aset
Rp528.135.700,-*

D.11 Pendapatan Pelepasan Aset

Pos Pendapatan Pelepasan Aset untuk Periode 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp528.135.700,- dan Rp0,-.

Beban Pelepasan Aset Rp0,-

D.12 Beban Pelepasan Aset

Pos Beban Pelepasan Aset untuk Periode 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,-.

*Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp4.978,-*

D.13 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Periode 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.978,- dan Rp425.371.576,-.

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp0,- **D.14 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Periode 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp404.000,-.

Pos Luar Biasa Rp 0,- **D.15 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp12.541.161.918,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp12.541.161.918,- dan Rp26.139.913.412,-.

Defisit LO

Rp6.260.215.910,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp6.260.215.910,- dan Rp133.371.570.527,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi yang

Mengurangi

Ekuitas

Rp8.637.128.980,-

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Jumlah Koreksi yang Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp8.637.128.980,- dan Rp0,-.

Dampak Kumulatif

Perubahan

Kebijakan Rp0,-

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Penyesuaian Nilai

Aset Rp0,-

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0,-*

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0,-*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi Rp0,-*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-Lain
Rp8.637.128.980,-*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp8.637.128.980,- dan Rp0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi Antar
Entitas*

Rp3.468.551.007,-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.468.551.007,- dan Rp119.772.819.033,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Ekuitas Akhir

Rp1.112.368.035,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.112.368.035,- dan Rp12.541.161.918,-

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.

LAMPIRAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN KLATEN 657480

Tgl Data : 27/01/26 8:22 AM
Tgl Cetak : 27/01/26 2:21 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	6,272,262,000	6,205,452,569	(66,809,431)	98.93	138,787,891,000	127,596,942,992	(11,190,948,008)	91.94
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

KLATEN, 27 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

IKA NURMALIANA DEWI
NIP. 197906282009122002



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (657480) KPU KABUPATEN KLATEN

Tgl Data : 27/01/26 8:22 AM

Tgl Cetak : 27/01/26 2:22 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	10,904,339,864	(10,904,339,864)	(100.00)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	311,114,581	(311,114,581)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	0	11,215,454,445	(11,215,454,445)	(100.00)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	3,203,066,351	3,175,849,301	27,217,050	0.86
Aset Tetap Lainnya	27,455,000	27,455,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,499,067,858)	(2,200,061,370)	(299,006,488)	13.59
JUMLAH ASET TETAP	731,453,493	1,003,242,931	(271,789,438)	(27.09)
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	383,211,097	407,411,097	(24,200,000)	(5.94)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(2,296,555)	(2,296,555)	0	0.00
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	380,914,542	405,114,542	(24,200,000)	(5.97)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	380,914,542	405,114,542	(24,200,000)	(5.97)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	805,908,441	805,908,441	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(805,908,441)	(805,908,441)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	1,112,368,035	12,623,811,918	(11,511,443,883)	(91.19)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	0	82,650,000	(82,650,000)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	82,650,000	(82,650,000)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN	0	82,650,000	(82,650,000)	(100.00)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,112,368,035	12,541,161,918	(11,428,793,883)	(91.13)
JUMLAH EKUITAS	1,112,368,035	12,541,161,918	(11,428,793,883)	(91.13)
JUMLAH EKUITAS	1,112,368,035	12,541,161,918	(11,428,793,883)	(91.13)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,112,368,035	12,623,811,918	(11,511,443,883)	(91.19)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (657480) KPU KABUPATEN KLATEN

Tgl Data : 27/01/26 8:22 AM

Tgl Cetak : 27/01/26 2:22 PM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

KLATEN, 27 Januari 2026

Pemangung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



TIKA NURMALIANA DEWI
NIP 197906282009122002

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (657480) KPU KABUPATEN KLATEN

Tgl Data : 27/01/26 8:22 AM

Tgl Cetak : 27/01/26 2:22 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	3,721,116	(3,721,116)	(100)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	3,721,116	(3,721,116)	(100)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	3,721,116	(3,721,116)	(100)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,148,520,464	2,659,832,463	488,688,001	18.373
Beban Persediaan	0	7,725,348,392	(7,725,348,392)	(100)
Beban Barang dan Jasa	2,361,225,046	119,046,459,073	(116,685,234,027)	(98.017)
Beban Pemeliharaan	287,336,790	171,616,893	115,719,897	67.429
Beban Perjalanan Dinas	692,267,800	3,900,492,374	(3,208,224,574)	(82.252)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
 SATUAN KERJA : (657480) KPU KABUPATEN KLATEN

Tgl Data : 27/01/26 8:22 AM

Tgl Cetak : 27/01/26 2:22 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	299,006,488	296,510,024	2,496,464	0.842
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	6,788,356,588	133,800,259,219	(127,011,902,631)	(94.926)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(6,788,356,588)	(133,796,538,103)	127,008,181,515	(94.926)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	528,135,700	0	528,135,700	
Pendapatan Pelepasan Aset	528,135,700	0	528,135,700	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4,978	424,967,576	(424,962,598)	(99.999)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4,978	425,371,576	(425,366,598)	(99.999)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	404,000	(404,000)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	528,140,678	424,967,576	103,173,102	24.278
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(6,260,215,910)	(133,371,570,527)	127,111,354,617	(95.306)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(6,260,215,910)	(133,371,570,527)	127,111,354,617	(95.306)

Keterangan :

FINAL

KLATEN, 27 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



IKA NURMALIANA DEWI
NIP 197906282009122002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
 SATUAN KERJA : (657480) KPU KABUPATEN KLATEN

Tgl Data : 27/01/26 6:38 AM

Tgl Cetak : 27/01/26 2:23 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	12,541,161,918	26,139,913,412	(13,598,751,494)	(52.02)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(6,260,215,910)	(133,371,570,527)	127,111,354,617	(95.31)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(8,637,128,980)	0	(8,637,128,980)	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	(8,637,128,980)	0	(8,637,128,980)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,468,551,007	119,772,819,033	(116,304,268,026)	(97.1)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(11,428,793,883)	(13,598,751,494)	2,169,957,611	(15.96)
EKUITAS AKHIR	1,112,368,035	12,541,161,918	(11,428,793,883)	(91.13)

Keterangan :

FINAL

KLATEN, 27 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN



IKA NURMALIANA DEWI
 NIP 197906282009122002